

Melawi Pecahkan Rekor

PONTIANAK. Pemkab Melawi menunjukkan perkembangan menggembirakan dalam mengelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar dikejutkan dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010, Rabu (16/3).

"Saya sangat senang dan cukup terkejut dengan penyerahan ini," ujar Ir Adi Sudibyo MM, Kepala BPK Perwakilan Kalbar kepada Equator usai menerima penyerahan LKPD Pemkab Melawi di kantornya, Rabu siang.

Keputusan Pemkab Melawi menyerahkan LKPD kemarin pantas mendapatkan pujian. Ini membuktikan bahwa mereka sudah mulai tertib dalam mengelola penggunaan keuangan di daerahnya. "Ini lebih awal dari batas waktu yang ditentukan, yakni akhir Maret. Mudah-mudahan daerah lain bisa mencontoh dan

segera memberikan LKPD-nya kepada kita," harap Adi.

Dalam hal penyerahan LKPD, Pemkab Melawi memang terkesan adem-ayem. Entitas-entitas lain, seperti Pemprov Kalbar dan sejumlah kabupaten/kota lain sudah lama berancang-ancang ingin menyerahkan LKPD bulan Maret. Tapi hingga kemarin, baru Pemkab Melawi yang sudah menyerahkan. "Ini tidak kita duga," ucap Adi.

Dalam undang-undang tentang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap entitas wajib menyerahkan LKPD-nya paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran selesai. Artinya, untuk penggunaan APBD tahun 2010, LKPD-nya paling lambat diserahkan

■ Halaman 7

Melawi Pecahkan

.... dari halaman 1

kan ke BPK tanggal 31 Maret tahun ini.

Berdasarkan pengalaman pada tahun lalu, banyak pemerintah daerah yang molor memberikan laporan keuangannya. Dari 15 entitas yang meliputi pemerintah provinsi dan 14 kabupaten/kota, kurang 50 persen yang memberikan laporan keuangan tepat waktu.

Data BPK Perwakilan Kalbar menyebutkan, khusus untuk tahun anggaran 2009, hanya ada lima entitas di Kalbar yang memberikan LKPD tepat waktu. Mereka adalah Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak, Bengkayang, Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya (KKR).

Kabupaten Pontianak adalah kabupaten tercepat yang memberikan LKPD, yakni tanggal 17 Maret 2010. Kota Pontianak dan Bengkayang tanggal 25 Maret, Kabupaten Sanggau tanggal 29 Maret, KKR tanggal 31 Maret. Namun pada tahun ini, rekor yang diungkir Kabupaten Pontianak tersebut

mampu dipecahkan Pemkab Melawi.

Sedangkan Kabupaten Melawi, pada tahun anggaran lalu menyerahkan LKPD pada bulan April bersama enam entitas lainnya. Mereka adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kayong Utara (KKU), dan Pemprov Kalbar.

Menurut Adi, dengan cepatnya Pemkab Melawi menyerahkan LKPD mereka, akan memudahkan BPK melakukan audit terhadap penggunaan APBD Melawi tahun anggaran 2011. Dengan sendirinya, audit terhadap keuangan Pemkab Melawi juga akan cepat selesai.

"Minggu depan kita akan turunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Pemkab Melawi," tukas Adi.

Pemeriksaan terhadap keuangan Pemkab Melawi yang dimaksud Adi adalah pemeriksaan terperinci. Pemeriksaan

ini meliputi pengumpulan data lanjutan, identifikasi masalah, analisis, konfirmasi, cek fisik, dan diskusi pembahasan. Kemudian tahap pengolahan data di tingkat pimpinan BPK, berupa finalisasi laporan yang mencakup perumusan opini oleh tim independent yang tidak boleh diintervensi.

Humas BPK Perwakilan Kalbar, Sigit Pratama Yudha menjelaskan, penyerahan LKPD Pemkab Melawi dilakukan di kantor BPK sekitar pukul 09.00 tadi pagi. LKPD itu diserahkan langsung oleh Sekda Melawi, Drs Ivo Titus Mulyono M Si didampingi Inspektat Melawi, Drs Appeles Itang, serta Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi DPKAD Melawi, Henri Simamora.

"Mudah-mudahan daerah lain segera menyusul. Soalnya kecepatan kita melakukan audit sangat tergantung dengan cepat atau lambatnya mereka menyerahkan LKPD," ujar Sigit. (bdu)